



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

USULAN NAMA CALON PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN DARI FRAKSI – FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Atas Nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 / 1773 / SJ, tanggal 27 Maret 2023, Hal Usul Nama Calon Penjabat Bupati / Wali Kota;
- b. bahwa Fraksi-Frakasi DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan usulan nama calon Penjabat Bupati Barito Selatan pada Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, Dalam Rangka Penetapan Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan, pada tanggal 4 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan dari Fraksi-Frakasi DPRD Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 03 / FPDIP_DPRD / BS / IV / 2023, tanggal 3 April 2023, Perihal Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan Masa Jabatan Mei 2023-Mei 2024;
 2. Surat Fraksi Golkar Nomor : 01/ DPRD-FG/04/2023, tanggal 3 April 2023, Perihal Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan Masa Jabatan Mei 2023-Mei 2024;
 3. Surat Fraksi PKB Nomor : 01 /FPKB/DPRD /IV/2003, tanggal 3 April 2023, Perihal Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan Masa Jabatan Mei 2023-Mei 2024;
 4. Surat Fraksi Nasdem Partai Persatuan Pembangunan (NP3) Nomor : 01/FNP3-DPRD/IV/2023, tanggal 3 April 2023, Perihal Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan Masa Jabatan Mei 2023-Mei 2024;
 5. Surat Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan (GDAK) Nomor : 01/FGDAK/IV/2023, tanggal 3 April 2023, Perihal Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan Masa Jabatan Mei 2023-Mei 2024;
 6. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, tanggal 4 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Barito Selatan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Usulan nama calon Penjabat Bupati Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan calon Penjabat Bupati Barito Selatan yang akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2023

KABUPATEN BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 USULAN NAMA CALON PENJABAT BUPATI BARITO
 SELATAN DARI FRAKSI-FRAKSI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
 SELATAN

USULAN NAMA CALON PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN DARI FRAKSI-FRAKSI
 DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

I. FRAKSI PDI PERJUANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	EDY PURWANTO, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan

II. FRAKSI GOLKAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	YOGA PRASETIANO UTOMO, S.STP, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dr. ITA MINARNI, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

III. FRAKSI PKB

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	EDY PURWANTO, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dr. ITA MINARNI, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

IV. FRAKSI NASDEM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (NP3)

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	EDY PURWANTO, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dr. ITA MINARNI, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

V. FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN (GDAK)

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISDA ARRIYANA, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	EDY PURWANTO, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Dr. ITA MINARNI, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan


 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN BARITO SELATAN,
 M. ITA MINARNI YUSRAN